



PROSIDING SEMINAR NASIONAL

90 TAHUN

SEMARAH

Pemuda



PROSIDING SEMINAR NASIONAL

90 Tahun Pemuda Pemuda

Para Penulis

Dr. Anastonia, M.Hum

Dr. Nopriyansman, M.Hum

Dr. Melawati, M.Hum

Dr. Irina, M.Hum

Herar Iskandar, S.S., M.Si

Drs. Sabar, M.Hum

Yudhi Andoni, S.S.,M.A

Ana F. Ramadhani, S.S.M.A

Wahyu Suri Yani, S.Hum

Prof. Dr. H. M. Sidiyasa

*Kami sangat bangga dengan
independen Indonesia tahun
1945 yang merupakan
Lahirnya d.t., Indonesia
dapat jadi sebagai contoh
untuk yang datang setelah
nya. Dulu pada 19-10-2005*



ISBN 978-602-70000-0-0
798027 230103

Dinamika Sistem Pemerintahan dan Perlawanan Rakyat Nias Pada Masa Kolonial Belanda

Drs. Sabat, M. Hum., Dr. Anatona, M. Hum.,

Drs. Purwo Husodo, M. Hum, Riski Syukri Zalukhu

Abstrak

Artikel ini merupakan hasil riset mengenai sejarah pulau-pulau di perairan sebelah barat Sumatera, studi kasus wilayah kepulauan Nias. Selama 3 abad belakangan, wilayah kepulauan Nias memiliki peran penting dalam konteks regional perairan di sebelah barat Sumatera. Saat organisasi dagang VOC Belanda datang ke kota Padang pada pertengahan abad ke-17 dan mendirikan sebuah loji di kota ini misalnya, maka langkah yang ditempuh VOC berikutnya ialah mengunjungi Pulau Nias melakukan hubungan dagang dengan penguasa setempat. Hal ini menunjukkan bahwa di antara pulau-pulau yang ada di gugusan perairan sebelah barat Sumatera, kedudukan pulau Nias sangat diperhitungkan. Dalam perkembangan berikutnya, kepulauan Nias akhirnya juga dikuasai oleh pemerintah kolonial Belanda. Selama Belanda berkuasa, banyak sekali dinamika perubahan yang terjadi di kepulauan tersebut di berbagai bidang seperti politik, ekonomi, sosial dan budaya serta keagamaan. Umumnya semua perubahan tersebut disebabkan pengaruh luar yang dibawa oleh pemerintah kolonial Belanda. Penulisan artikel ini bermaksud untuk menelusuri kembali sekaligus merekonstruksi bagian-bagian penting yang terjadi di kepulauan Nias selama masa pemerintahan kolonial Belanda, terutama pengaruh bidang pemerintahan kolonial Belanda dan perjuangan rakyat Nias melawan kolonial Belanda di pulau Nias yang semuanya ini berpengaruh terhadap identitas dan kebudayaan orang Nias hingga saat ini.

Keywords: Pulau Nias, Pemerintahan Tradisional, Pemerintahan Kolonial dan Perjuangan Rakyat

penelitian ini ialah, Bagaimanakah dinamika sejarah pemerintahan dan perjuangan rakyat Nias pada masa kolonial Belanda?

B. Pemerintahan Tradisional di Nias

Masyarakat Nias pada umumnya memiliki pelapisan sosial dalam masyarakat yang terdiri 4 (empat) lapisan, terutama di Nias bagian selatan yaitu di Kecamatan Teluk Dalam sebagai berikut: (1) *Si'ulu* (bangsawan); (2) *Ere* (pemuka agama); (3) *OnoMbanua* (rakyat jelata); (4) *Sawuyir* (budak). Lapisan *Si'ulu* dapat dibagi menjadi 2 golongan yaitu *balo Ziwu* (yang memerintah) dan *Si'ulu* (bangsawan kebanyakan). *Ono Mbanua* dapat dibagi menjadi 2 golongan yaitu *Sila* (cerdik pandai dan pemuka rakyat) dan *Sato* (rakyat kebanyakan). Sedangkan *Sawuyir* dapat dibagi menjadi 3 golongan yaitu *binu* (orang yang menjadi budak karena kalah perang atau di culik), *sondrava hare* (orang menjadi budak karena tidak dapat membayar hutang) dan *kolito* (orang yang menjadi budak karena ditebus orang setelah dijatuhi hukuman mati) (Koentjoroningrat, 1982:49).

Sistem pemerintahan di Nias pada masa prakolonial Belanda, sebelum abad ke-19 sangat erat kaitannya dengan bentuk desa tradisional yang ada di Nias. Desa-desa ini merupakan sebuah bentuk kesatuan pemerintahan yang letaknya berpecah-pecah dan merupakan bentuk pemerintahan yang pertama uang ada di Nias. Sebelum kedatangan orang Belanda, orang Nias terpecah menjadi beberapa kesatuan setempat yang otonom yang disebut *ori* (negeri). Tiap *ori* merupakan gabungan dari beberapa *banua* (desa), dan setiap *banua* di huni oleh bagian-bagian dari beberapa *mado*. Tiap *ori* dikepalai oleh *tuhonori* (kepala *ori*) dan tiap *banua* di kepalai oleh seorang *salawa* (kepala desa). Pada pemerintahan Belanda semua *ori* dikepuataan Nias dipersatukan menjadi *Afdeeling Nias* di bawah

Memperkuat Komitmen Keindonesiaan di Era G. 4.0

A. Pendahuluan

Studi mengenai gugusan pulau-pulau yang membentang di sebelah barat Sumatera masih terhitung minim dan terbatas. Dari sejumlah studi yang sudah ada, kebanyakan dilakukan oleh para peneliti asing terutama Belanda, Inggris, Swiss, Jerman, Italia, Amerika Serikat, dan Jepang (Alain Viaro, 2015). Beberapa pulau yang penting dan memiliki ukuran relatif besar dimulai dari yang paling utara yaitu Pulau Simeulue. Kemudian diikuti oleh Pulau Nias dan pulau-pulau kecil di sekitarnya seperti Hinako, pulau-pulau Batu termasuk pulau Tello.

Belanda pertamakali menginjakkan kakinya pada tahun 1669 di bagian selatan pulau Nias tepatnya di Teluk Dalam tujuannya untuk berdagang dengan membuat kontrak-kontrak dengan penguasa setempat. Akan tetapi, secara administrasi penguasaan pulau ini baru berlangsung pada tahun 1826. Sebelumnya Belanda mendirikan pos militernya pada tahun 1924 di kota pelabuhan Gunung Sitoli.

Pada tahun 1840 sejumlah garnisun Belanda mulai ditempatkan di Gunung Sitoli (Andrew Beatty, 1991:4). Pada tahun yang sama dibuka pula sebuah pos militer Belanda di sana (E.B. Kielstra, 1883; M.C. Ricklefs, 1993:217). Kemudian secara bertahap, menyusul dibuka beberapa pos lainnya (E.S. de Klerck, 1912). Hingga tahun 1853 pengaruh Belanda atas Pulau Nias hanya terbatas di sekitar pos-pos yang didirikan khususnya di Gunung Sitoli (ANRI, SWk. 151.1), namun pada tahun 1863 pihak Belanda sepenuhnya berhasil menguasai Pulau Nias (E.B. Kielstra; M.C. Ricklefs; Kees Groeneboer). Masuknya pemerintah kolonial Belanda secara berangsur-angsur membawa perubahan yang sangat besar di Nias seperti administrasi pemerintahan, militer, sekolah, agama, dan lain-lain. Permasalahan mendasar pertama dalam

di pimpin secara mandiri oleh sekelompok bangsawan (*si'ulu*) setempat dan terlepas dari daerah lainnya. Di era sifat yang otonom itu Nias tidak pernah menjadi satu kesatuan politik secara utuh, yang masing-masing mempunyai kedaulatan sendiri yang tidak boleh dicampuri lainnya. Sistem pemerintahan yang dijalankan di Nias bersifat kolektif yang terdiri kaum bangsawan (*si'ulu*) dengan seorang raja (*balosi'ulu*) yang mengepalainya. Kelemahan sistem ini adalah kaum bangsawan mempunyai hubungan kekerabatan sehingga praktis kekuasaan menjadi monopoli bangsawan. Ada pula pemerintahan federasi yang di sebut Öri yaitu koalisi beberapa *banua* yang membentuk pemerintahan gabungan. Mula-mula federasi Öri dikenal di Nias Utara, tetapi setelah zaman penjajahan Belanda federasi ini mulai diterapkan di Nias Selatan (Samuel Novelman Wau, 2017:113-114).

Meskipun Belanda tetap mempertahankan dan memelihara eksistensi Öri sebagai bentuk pemerintahan asli Nias, namun Öri pada masa pemerintahan kolonial Belanda telah berubah fungsinya. Fungsi semula untuk memperkuat pemerintahan tradisional berubah fungsi menjadi alat penjajahan Belanda yang tentu menindas rakyat. Belanda memeralat para *tukhenöri* demi kepentingan Belanda seperti memungut pajak, mengerahkan pekerja rodi. Akibatnya ada beberapa pimpinan Öri dan *tukhenöri* menentang campurtangan Belanda. Mereka menentang kerja rodi, setoran pajak sebesar 10 perak dan 3 sen setiap kepala keluarga (Tim Penyusun, 1989:53). Mereka juga mempersiapkan perlawanan, membangun benteng perlawanan, memobilisir rakyat untuk berjuang, membuat peralatan perang, mengumpulkan perbekalan makanan (Tim Penyusun, 1989:54).

Memperkuat Komitmen Ketidufonesiaan di Era G. 4.0

seorang *Assisten Resident*. Para *tukhenöri* tetap dipertahankan oleh Belanda untuk mengurus *ori-ori* (Koenjoroningrat, 1982:48).

Istilah penyebutan pemimpin sebuah *banua* di Nias tidaklah sama. Pimpinan tertinggi dari sebuah *banua* di Nias Utara di sebut *salawa* sedangkan di Nias Tengah dan Selatan di sebut *si'ulu*. Baik *salawa* maupun *si'ulu* termasuk dalam kategori golongan bangsawan yaitu strata social masyarakat paling atas dan termasuk golongan orang berada dan memerintah karena mempunyai otoritas. Lingkup pemerintahan seorang *salawa* dan *si'ulu* terbatas seantero *banua* sebuah kawasan yang masih ada hubungannya dengan desa induk. Seorang *salawa* dan *si'ulu* dapat memerintah karena dipilih atau ditunjuk oleh dewan *banua* yaitu badan musyawarah dari para pengtua dan kaum bangsawan lainnya (Anatona, tt.35).

Khusus di Nias Utara dan Nias Tengah beberapa *banua* yang berdekatan biasanya membentuk semacam federasi yang permanen yang mencakup penggabungan beberapa *banua*. Gabungan dari beberapa *banua* inilah yang di sebut Öri, yang setelah tahun 1860 öri ini kemudian diadopsi oleh pemerintah Hindia Belanda untuk diterapkan di seluruh Nias. Daerah Öri dipimpin oleh seorang kepala öri yang di sebut *tukhenöri*, namun karena wilayahnya luas makaseorang *tukhenöri* dibantu oleh beberapa orang yang bertugas membantu *tukhenöri*. *Binua* dan Öri di Nias masing-masing memiliki dewan pimpinan yang di sebut *sise'oli*. Nama *sise'oli* baik di tingkat *banua* maupun *öri*, di sebut sebagai *salawa banua* dan *salawa öri* (Anatona, tt.35). Pemerintahan adat suku Nias juga mengenal adanya lembaga legislative yang di sebut *fondrakö*, yaitu suatu badan musyawarah dari tokoh-tokoh adat untuk menetapkan hukum tentang berbagai bidang kehidupan (Anatona, tt.31).

Menurut Samuel Novelman Wau, terdapat ciri-ciri sistem pemerintahan tradisional di seluruh Nias. Sistem pemerintahan tradisional Nias bersifat monarki-otonom, artinya tiap-tiap daerah

C. Pemerintahan Kolonial Belanda di Nias

Pada tahun 1663 VOC memulai hubungan dagang dengan Nias. Pada saat itu Nias juga sudah mengadakan kontak dagang dengan Aceh dan Padang. Sebelum VOC memluas wilayah kekuasaan ke bagian barat dan bagian tengah pulau Nias, maka kelompok *zendang* ini terlebih dahulu mendatangi wilayah Nias. Dengan begitu masuknya Agama Katholik ke Nias secara efektif berbarengan dengan perluasan kekuasaan Belanda di pulau Nias (Ketut Wiradnyana, 2010:109). Pada awal abad ke-19 kekuasaan kolonial Belanda masih berfokus di Jawa. Pertama-tama Dendeles membagi pulau Jawa menjadi 5 daerah administrasi yang di sebut *pefecture* yang masing-masing dikepalai seorang *pefectur* berkebangsaan Eropa. Pada tingkat bumiputra didirikan 30 kabupaten, di mana para bupati digaji dan menjadi pegawai kolonial Belanda. (Mestika Zed, 1989:21) yang oleh Daendeles jabatan bupati dimasukkan dalam hirarki birokrasi pemerintah kolonial Belanda.

Pada saat pemerintah mulai tercurah keluar Jawa pada akhir abad ke-19, maka secara perlahan-lahan pembagian daerah administratif diperluas. Kemudian pemerintah kolonial Belanda dibagi dalam 8 daerah provinsi (Mestika Zed, 1989:23) yaitu:

- a. 3 provinsi di Jawa ialah: (1) Jawa Barat, (2) Jawa Tengah, (3) Jawa Timur.

- b. Sedangkan 2 lainnya terdapat di Jawa sebagai pemerintahan khusus yang di sebut *Vorstenlanden* yaitu (4) Yogyakarta dan (5) Surakarta.

- c. Selebihnya masih ada 3 provinsi lagi di luar Jawa (*Batien*

Gewesten) yaitu: (6) Sumatera, (7) Borneo/Kalimantan, dan (8) *Groot Oost* (daerah Indonesia Timur sekarang).

Berdasarkan Surat Keputusan (*Bestuut*) dari *Gouvernement Commissaris* Cochius tanggal 29 November 1837 diputuskan bahwa

status Keresidenan Sumatera Barat ditingkatkan menjadi *Gouvernement* sehingga sejak saat itu menjadi *Gouvernement van Sumatra's Westkust* yang di pimpin oleh *Gouverneur*. Sebagai konsekuensinya maka tahun 1837 *Gouvernement van Sumatra's Westkust* dibagi menjadi 2 (dua) *Residentie* yaitu: a) *Residentie van Padang* dengan ibu kota di Padang dan b) *Noordelijke Residentie* dengan ibu kota di Air Bangis (Gusti Asnan, 2006:44). *Noordelijke Residentie* di bagi 5 (lima) *Afdeelingen* yaitu (Gusti Asnan, 2006:46): (1) Air Bangis, (2) Pasaman dan *Westelijke Ophindistricten*, (3) Natal dan Tapanuli dengan sorang *Controleur* Kelas I di Natal dan seorang *Controleur* kelas 3 di Tapanuli, (4) Mandahiling dan Angkola, (5) Rao, Bonjol dan *Oosterlijke Ophindistricten*.

Reorganisasi pemerintahan terus dilakukan pada tahun 1841, tahun 1842 selaras dengan perluasan wilayah Hindia Belanda, maka pada pertengahan abad ke-19 *Gouvernement Sumatra's Westkust* dibagi menjadi 3 (tiga) Keresidenan yaitu: 1) Keresidenan *Padangsche Bendenlanden*, 2) Keresidenan *Padangsche Bovenlanden* dan 3) Keresidenan Tapanuli (Gusti Asnan, 2006:53). Sementara Keresidenan Tapanuli di bagi menjadi 7 (tujuh) *Afdeelingen* yaitu (Gusti Asnan, 2006:55-56): (1) *Afdeeling Singkel*, (2) *Afdeeling Barus*, (3) *Afdeeling Sibolga*, (4) *Afdeeling Angkola*, (5) *Afdeeling Mandahiling*, (6) *Afdeeling Natal*, (7) *Afdeeling Pulau Nias* berkedudukan di Gunung Sitoli.

Setelah *Afdeeling* pulau Nias dibentuk, maka segera pemerintah kolonial Belanda semakin memantapkan kekuasaannya. Pada tahun 1857 pemerintah kolonial Belanda menjalankan politik bahasa di Nias yaitu memberlakukan atau memakai bahasa belanda sebagai bahasa pengantar di pulau Nias. Melalui bahasa Belanda ini yang sekaligus sebagai sarana untuk penyebaran Agama Kristen. Pemerintah kolonial Belanda menyadari bahwa bahasa Belanda amat sulit digunakan untuk

Pada tahun 1907 seorang *controleur* Schröder ditempatkan di pulau Nias. Pada saat itu wilayah Teluk Dalam belum mau tunduk kepada pemerintah kolonial Belanda. Maka dari itu pada tahun 1908 para bangsawan (*si'ulu*) dari Nias Selatan bersama dengan *si'ulu Saönigehe Bawö Mataluo* mengadakan rapat untuk melawan Belanda. Namun Belanda berhasil menaklukkan Nias Selatan dan mendirikan benteng, sehingga pada akhir 1908 seluruh pulau Nias ditaklukkan Belanda. Akhirnya Jendral van Sodieten mengangkat Nias Menjadi *Afdeeling* (kabupaten) dengan Asisten Residen pertama adalah Van Vuuren (P.Johanes M. Hammerle, 2017:61).

Selanjutnya Van Vuuren diganti oleh Asisten Demang Rappard (1913-1915). Segera setelah itu *Afdeeling* Nias dibagi ke dalam 3 (tiga) *gezagheiber* yaitu (Tim Penyusun, 1989:50) yaitu: (1) Noord Nias yang berkedudukan di Lahewa *gezagheiber* pertama bernama Maidman, (2) Zuid Nias berkedudukan di Teluk Dalam *gezagheiber* pertama bernama Hajehus (1911-1913), lalu diganti oleh Stoop (1914-1919), (3) West Nias berkedudukan di Lolowe u, kemudian dipindahkan ke Sirombu tahun 1910. Adapun para kontroler dan Asisten Residen Belanda yang di tempatkan di kota Gunung Sitoli sebagai berikut: (1) Kontroler Eman (1902-1904), (2) Kontroler Lijsten (1904-1908), (3) Asisten Residen Van Vuuren (1908-1913), (4) Asisten Residen Rappard (1913-1915), (5) Kontroler Naidman (1915-1919), (6) Asisten Residen P. Karthaus (1919-?), (7) Asisten Residen Boumen, (8) Asisten Residen Plast (sampai 1942 adalah pejabat Belanda yang terakhir di Nias). Setelah Jepang masuk ke Nias maka digantikan oleh Gunseibu Suzuki, bangsa Jepang (Mei 1942-25 Agustus 1945)

Tahun 1915 pemerintah kolonial Belanda di Lahagu pindah ke Mandrehe (Nias Barat), sehingga pengaruh Belanda semakin banyak dan orang Nias banyak yang menjalankan perintah Belanda.

pendidikan, maka akhirnya tahun 1858 diputuskan untuk memberikan pendidikan di Nias dengan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar, sehingga tidak menggunakan bahasa Belanda ((Kees Groeboer, 1999:35).

Afdeeling Pulau Nias ini terbagi ke dalam 4 *Districten* dan tiap-tiap distrik di di pimpin oleh Demang. Keempat kedemangan itu ialah: (1) Demang Gunungsitoli Nias Timur, bergabung dalam beberapa kelompok Nöi-Öri. Dulu bernama Luaha Nou, Hili Gatoli, sekarang Gunungsitoli, (2) Demang Nias selatan, bergabung beberapa Öri. Dulu bernama Luha Wara, dan yang sekarang sinamakan Teluk Dalam, (3) Demang Nias Barat, yang terdiri 12 kelompok öri. Dulu bernama Asi Gombu, yang sekarang dinamakan Sirombu, (4) Demang Nias Utara, yang terdiri beberapa kelompok öri. Dulu bernama Uja Lewa, yang sekarang bernama Lahewa (Fangchao Matias Zebua, 2015:84).

Kemudian pada tahun 1919, Nias dengan pulau-pulau sekitarnya menjadi 1 (satu) *Afdeeling* dalam lingkungan Residen Tapanuli. Pada saat itu *Afdeeling* Nias dibagi ke dalam 2 (dua) *Onderafdeeling* yaitu: (1) *Onderafdeeling* Nias Selatan dengan ibu kota di Teluk Dalam, (2) *Onderafdeeling* Nias Utara dengan ibu kota Gunung Sitoli. Setiap *Onderafdeeling* dipimpin oleh seorang kontroler, dan setiap *Onderafdeeling* dibagi menjadi beberapa distrik dan *Onderdistrik* yang masing-masing di pimpin oleh seorang Demang dan Asisten Demang. *Onderdistrik* di Teluk Dalam dipimpin oleh Asisten Demang yang pertama yang bernama Ama Kaenu Zebua. Sementara pemerintahan di bawah *Onderdistrik* ialah *Öri* yang dipimpin oleh *Tuhenöri* (bangsawan kebanyakan). Pemerintahan di daerah ini dilaksanakan untuk kepentingan pemerintahan Belanda (Emanuel Lasawa Fau, 1989:23-24).

pendaratan di Pantai Luaha Gundre merca langsung dihadang oleh pejuang-pejuang dari desa Hilizondregé'asi. Penghadangan dipimpin oleh seorang *Bokalima* (Panglima Perang) dari *S'ulu*(pemimpin) Hilizondregé'asi bernama Tuhululo Ge'e (Tim Penyusun, 1989:7). Penghadangan dilakukan dengan menempatkan para pemuda sambil bersembunyi disepanjang jalan mulai dari Lagundi sampai Hilizondregé'asi. Pasukan pejuang Nias dilengkapi dengan senjata batu, bambu runcing, tombak, *barise* (perisai), *telegu* (pisau khusus berburu) dan pedang.

Pada tahun 1854 terjadi perang saudara di Nias Selatan antara desa Orahili yang bersekutu dengan desa Botobilitano dengan desa Bawoamamolo bersekutu dengan desa Hilizondregé'asi. Dalam perang saudara ini Si'ulu Bawoamamolo, Tuhamaenamolo tewas dan sampai sekarang dikenal dengan istilah *Amada Sakao Baisaha* (pimpinan atau orang tua yang tewas di muara sekitar Teluk Luaha Gundre atau Lagundi) (Tim Penyusun, 1989:10). Pada pertengahan 1854 Residen Netcher mengunjungi daerah yang saling bermusuhan dengan berpura-pura bertindak sebagai misi perdamaian dan telah mempersiapkan konsep keputusan yaitu menjatuhkan *denda* yang berat atas desa Orahili. Kepentingan Belanda melakukan operasi perdamaian sudah tentu tidak terlepas dari kepentingan politik penjajahan Belanda yaitu "*divide et impera*" (Tim Penyusun, 1989:10).

Perlawanan rakyat Nias Selatan yang kedua terjadi pada Desember 1855. Pada tanggal 30 Desember 1855 ekspedisi Militer II berangkat dari Sibolga lewat Gunungsitoli menuju Teluk Lagundi. Pemerintah kolonial Belanda membentuk *taskforce*, yaitu suatu ekspedisi militer yang dipimpin Kapten de Vos. Penduduk desa Orahili tidak tinggal diam atas berita kedatangan pasukan Belanda, semua jalan menuju desa Orahili diberi ranjau berupa panah. Ekspedisi militer Belanda bergerak menuju desa Orahili (T.

Memperkuat Komitmen Keindonesiaan di Era G. 4.0

Oleh karena itu bertambah lagi tempat pemerintahan Asisten Demang yaitu: (1) Demang Gunungsitoli, (2) Demang Idano Gomo, (3) Demang Gomo, (4) Demang Lahusa, (5) Demang Telukdalam, (6) Demang Lolowa'u, (7) Demang Mendrehe, (8) Demang Lahewa, (9) Demang Tuhemberua, (10) Demang Pulau-pulau Tello. Walaupun terdapat 10 tempat Asisten esident, namun yang terpakai hanyalah 2 (dua) tempat Demang yaitu: (a) Nias Timur, Nias Utara yang tinggal di Gunungsitoli dan (b) Nias Barat, Nias Selatan yang tinggal di Telukdalam (Fangehao Matias Zebua, 2015:85-86).

D. Perlawanan Rakyat Nias Terhadap Kolonial Belanda

Kehadiran militer Belanda di Nias menimbulkan amarah rakyat, terutama ketika Letnan Donleben bertugas di Nias pada tahun 1846 untuk mendata topografi pulau Nias dan wakilnya Kapten Kroesen. Pemimpin benteng militer Nias di Teluk Luaha Gundre (sekarang disebut Lagundi) diserang oleh rombongan penduduk yang datang dengan perlengkapan perang, sehingga terpaksa pulang ke benteng militer di Gunungsitoli (P. Johannes, M. Hammerle, 2017:1). Lokasi serangan sampai sekarang dikenal dengan nama Daro-Daro Amatola (atau tempat duduk melepas lelah) karena di tempat tersebut terdapat sebuah batu besar yang datar permukaannya sehingga oleh penduduk setempat dimanfaatkan untuk tempat duduk sambil beristirahat.

Peristiwa tersebut membuat amarah Belanda, kemudian pada tahun 1847, Pemerintahan Belanda di Padang mengirimkan pasukan yang dipimpin oleh Let. Kol Van den Hart mendarat di Teluk Lagundi di pantai selatan Nias untuk menyerang para penduduk. Kedatangan satuan tugas tempur Belanda untuk melakukan serangan balasan, begitu kapal perang Belanda tiba di Teluk Luaha Gundre (Lagundi). Begitu pasukan Belanda melakukan

Hammerle, 2017:3). Sejak tahun 1856, perdagangan budak secara *de jure* dilarang dan harus berakhir, tetapi secara *de facto* masih berlangsung secara tersembunyi. Orang Nias yang dibawa ke Padang disebut *Pandelingan*. Dalam bahasa Belanda *pard* berarti jaminan atau agunan. Dengan demikian orang Nias yang ada di Padang menjadi seperti jaminan atau agunan (P. Johannes. M. Hammerle, 2017:20).

Pada tanggal 17 Februari 1863 Satuan Tugas Ekspedisi Militer V Belanda diberangkatkan dengan iring-iringan konvoi dari Padang ke Sibolga. Konvoi tiba di Sibolga tanggal 20 Februari 1863. Setelah tiga hari mengadakan persiapan di Sibolga maka pada tanggal 23 Februari 1863 Satuan Tugas berangkat menuju Pulau Nias dan pada tanggal 25 Februari 1863 tiba di Gunung Sitoli. Dari Gunung Sitoli Satuan Tugas menuju Lagundi. Setelah beberapa bulan berada di Lagundi disertai pengamatan yang cermat maka pada tanggal 24 Mei 1863 oleh pimpinan mengeluarkan perintah harian dan pada tanggal 25 Mei 1863 semua pasukan diperintahkan untuk melakukan pendaratan dan invasi ke Orahili. (Tim Penyusun, 1989:26-27).

Pada tanggal 1 Juni 1863 pasukan Belanda mulai membuka serangan ke Orahili dengan melepaskan tembakan mortar dan granat. Oleh karena faktor keunggulan persenjataan dan pengalaman perang yang dimiliki pihak pasukan Belanda, maka para pejuang tidak dapat bertahan lebih lama dalam benteng Orahili. Dari pada menyerah atau ditawan oleh pasukan Belanda maka Tuhobadano Fau dan Saonigo sebagai pimpinan pejuang mengeluarkan perintah kepada anak buahnya untuk bersama-sama mengundurkan diri ke pedalaman sambil meneruskan perlawanan secara bergelombang (Tim Penyusun, 1989:29).

Pada tanggal 6 Juni 1863 tentara Belanda menuju desa Botohosi, sesampai di tempat, para penduduk sudah banyak yang

Memperkuat Komitmen Keindonesiaan di Era G. 4.0

Lukman Sinar, 2017). Senjata pemuda-pemuda Orahili sangat sederhana seperti tombak, pedang dan pisau. Hal ini sangat berbeda dengan persenjataan militer Belanda yang cukup modern. Pemuda-pemuda Orahili menghadapi militer Belanda dengan gagah berani meskipun dengan persenjataan apa adanya.

Melihat perlawanan pemuda-pemuda Orahili yang gigih dan pemberani, pasukan Belanda mulai mundur dari medan peperangan kembali ke Sibolga. Dengan kegagalan tersebut dalam menguasai seluruh Nias, penduduk yang digambarkan masih primitif ternyata telah memberikan perlawanan dengan kekalahan dipihak pasukan Belanda. Sejak saat itu pemerintah Kolonial Belanda memberikan julukan kepada pimpinan perlawanan rakyat Orahili (Tuhobadano Fau) sebagai "*De Verdrijver der Hollanders*" (Pengusir orang-orang Belanda)" (Tim Penyusun, 1989:18).

Perlawanan rakyat Nias Selatan ketiga terjadi pada tahun 1856. Kegagalan demi kegagalan dialami oleh militer Belanda di Nias. Mendengar kegagalan terus menerus di Nias membuat pimpinan pemerintah penajajahan Belanda di Padang Jenderal Van Swieten sangat marah menerima laporan Kapten De Vos bahwa pasukannya dipukul mundur oleh para pejuang Nias Selatan dan bahkan banyak korban yang tewas serta kerugian senjata yang ditinggalkan dalam pertempuran. (Tim Penyusun, 1989:19). Pimpinan operasi militer ketiga di Nias Selatan dipimpin Mayor J. H. Crena dengan wakilnya Kapten H. P. de Vos (komandan garnizun Gunung Sitoli).

Pada bulan Desember 1856, pada suatu rapat umum, Residen P.T. Couperus dengan resmi menjadikan wilayah Lagundi sebagai hak milik Belanda dan mengumumkan bagaimana pejabat setempat harus memegang pemerintahan. Umpamanya dilarang mengekspor budak atau orang lain yang dibeli (P. Johannes. M.

Memperkuat Komitmen Keindonesiaan di Era G. 4.0

mengungsi dan tidak mengadakan perlawanan. Desa mereka dibumihanguskan oleh tentara Belanda. Sekembali di desa Botohosi, tentara Belanda masuk lagi ke desa Orahili sambil membumihanguskannya. Pengumuman resmi (*Staatsblad* Nr. 104 tahun 1864 dalam lembaran Pemerintah Belanda berbunyi: "Pulau-pulau di sebelah Barat Sumatera sudah ditaklukkan di bawah kekuasaan pemerintahan Belanda (P. Johannes. M. Hammerle, 2017:13).

Setelah berhasil menguasai desa Orahili, pasukan Belanda melanjutkan operasi militernya ke desa Botohosi sekutu dari Orahili. Mereka membakar desa Botohosi sehingga rata dengan tanah. Pada tanggal 11 Juni 1863 benteng Orahili dapat diledakkan dan hancur rata dengan tanah. Istana atau rumah adat Si'ulu Orahili yang penuh ukiran dan patung-patung berukir yang terbuat dari batu rata dengan tanah. Penduduk Orahili terpaksa mengungsi ke tempat lain seperti ke Baruzo Sifado (Tim Penyusun, 1989:31).

Pada tahun 1878 dengan dukungan Belanda, desa Botohosi dihancurkan oleh pemuda-pemuda desa Fadoro. Para penduduk Botohosi tercerai berai. Ada yang ke desa Bawomataluo dan Hilizondrege'asi. Pada waktu itu penduduk Orahili sudah meninggalkan desa mereka yang telah dibumihanguskan oleh tentara Belanda (pada tahun 1863) dan membangun desa baru yang bernama Fanayama atau Bawomataluo. Meskipun demikian masih ada sebagian penduduk dari desa Botohosi yang tidak mau bergabung dengan desa lain. Mereka mendirikan desa baru yaitu desa Hilizondrekha (P. Johannes. M. Hammerle, 2017:21).

Pada tahun 1907 wilayah Teluk Dalam, Nias Selatan belum mau tunduk pada Belanda. Pada tahun 1908 para bangsawan (*Si'ulu*) dari Nias Selatan bersama dengan *Si'ulu* Saonige'ho dari Bawomataluo mengadakan rapat untuk melawan Belanda. Pasukan

Belanda dengan 300 prajurit masuk Nias Selatan melalui sungai Susua. Pasukan Belanda menaklukkan Nias Selatan dan mendirikan benteng Si'ulu Saonige'ho ditangkap dan dibawa ke Gunung Sitoli. Oleh karena itu sejak akhir tahun 1908 seluruh Nias ditaklukkan oleh Belanda. (P. Johannes. M. Hammerle, 2017:61). Saonige'ho memimpin di Orahili dari tahun 1902-1908.

Pada tahun 1908 desa Orahili dipimpin oleh anak muda yang bernama Ruyu dalam usia 24 tahun. Ruyu merupakan anak keturunan pejuang Orahili, kakeknya Laowo pemimpin dan pejuang Orahili pada tahun 1863, sementara ayahnya Saonige'ho adalah pemimpin dan pejuang Orahili pada tahun 1902 (Samuel Novelman Wau, 2017:73).

Perjuangan yang dilakukan Ruyu berbeda dengan yang dilakukan oleh ayah dan kakeknya. Ayah dan kakeknya berjuang melawan Belanda dengan mengangkat senjata, sementara Ruyu sadar dengan mengangkat senjata tidak akan pernah mengusir penjajah karena perlengkapan persenjataan yang tidak memadai. Ruyu berjuang melawan Kolonial Belanda dengan cara diplomasi. Ruyu melawan penjajah dengan cara perundingan. Kecerdasan dan keberanian modal utama menghadapi Belanda (Samuel Novelman Wau, 2017:93).

Perlawanan Rakyat Nias terhadap pemerintahan kolonial Belanda tidak hanya terjadi di Nias Selatan, di Nias Tengahpun rakyat berjuang untuk mengusir penjajah yang bertindak sewenang-wenang. Pemerintah kolonial Belanda mengadakan ekspedisi militer ke Nias Tengah (mereka menyebut dengan Ekspedisi Militer IV) sebagai komandan satuan tugas adalah Spanjaard. Para pejuang Nias Tengah seperti: Tuha La'imba Ndruru, Siwalato Ndruru, Nitaho Halawa, Siwahumola Halawa, Zakibu Halawa, Balohalu Waruwu, Saefa Maria Halawa, dan Sitambaho Waruwu sangat menentang kehadiran orang-orang Belanda. Pimpinan pejuang di

Memperkuat Komitmen Keindonesiaan di Era G. 4.0

Nias Tengah terdiri dari para *tuhenori* dan *satewa*, sedangkan pimpinan gabungan para pejuang adalah Tuha Laimba Ndruru pemegang pimpinan adat di Nias Tengah (Tim Penyusun, 1989:45).

Diantara pejuang Nias Tengah terdapat seorang keturunan suku Aceh bernama Barusi'ite Polem. Pergaulannya dengan pejuang cukup baik dan tidak asing lagi bahkan sudah berbaur dengan masyarakat setempat. Ia mengawini putri salah seorang *ba'igui* (bangsawan) sebagai istri. Barusi'ite Polem memegang peranan yang cukup strategis, yaitu sebagai instruktur mengenai cara menggunakan meriam dan senjata api lainnya yang dianggap modern pada waktu itu (Tim Penyusun, 1989:46).

Pada tanggal 17 Februari 1862 pasukan Belanda bergerak dari Gunung Sitoli menuju Nias Tengah. Sasaran utama mereka adalah menghancurkan benteng Hillolowalu. Pada tanggal 18 Februari 1862 pasukan Belanda mendekati benteng Hillolowalu. Dulain pihak gong yang ada di pos Siwalawa dibunyikan dan bersamaan dengan terdengarnya suara gong maka para pejuang di benteng Hillolowalu segera mengambil posisi dalam keadaan siaga penuh. Pasukan Belanda semakin mendekat dan pada jarak pandang terlihat pada mereka para pejuang menari-nari di atas bukit sambil menggejek kedatangan mereka (Tim Penyusun, 1989:47).

Sejak adanya pemekaran pemerintahan penjajahan Belanda di Pulau Nias pada tahun 1908, maka di Nias bagian tengah dan barat mengadakan rapat rutin pemerintahannya. Pada saat rapat dimulai tiba-tiba suasana berubah menjadi tegang karena pejabat Belanda yang memimpin rapat sempat melihat Tuhenori Tuha La'imba Ndruru, langsung marah dan membentakinya. Tuhenori Tuha La'imba Ndruru tidak patuh terhadap tata tertib pemerintah kolonial Belanda (Tim Penyusun, 1989:52). Pada tahun 1908, pemerintah kolonial Belanda menertibkan peraturan dan larangan.

Contohnya: peternakan babi tidak boleh dilakukan lagi di bawah rumah dan orang mati harus dikubur, tidak boleh dibiarkan di atas tanah (P. Johannes. M. Hammerle, 2017:22).

Pada tahun 1915, pemerintah kolonial Belanda menyelenggarakan sensus yang meliputi berbagai bidang. Sebenarnya penyelenggaraan sensus tersebut hanya sebagai siasat untuk memperoleh informasi dalam rangka melacak jejak para pimpinan pejuang yang belum berhasil mereka tangkap. Pimpinan pemerintah kolonial Belanda dalam hal ini *Gezaghebber* Van Lohagu mengeluarkan perintah penangkapan para *tuhenori* yang menjadi pimpinan pejuang. Penangkapan dilakukan dengan menggunakan berbagai siasat, seperti penangkapan terhadap Balohalu Waruwu, Niatano Halawa, Saefa Maria Halawa dibuang ke Tapanuli Utara. Sedangkan Rajanako Marunduri dibuang ke Tapanuli Selatan dan kuburannya masih ada sampai sekarang di Padang Sidempuan. Tuha La'imba Ndruru yang tertangkap di Uluwi dibuang ke Tapanuli Tengah (Sibolga) dan tidak lama kemudian dipindahkan ke rumah tahanan Belanda di Hilisimaetano (Tim Penyusun, 1989:62).

Sementara perlawanan rakyat Nias Barat dikaitkan dengan penyebaran agama Kristen. Pada tahun 1891 pekabaran Injil berkembang sampai di Nias Barat yaitu di desa Tugalamanu Lahomi dan kemudian pada tahun 1899 datang utusan *Zendingsteriaal* Barmen Jermani bersama pendeta Sporket dan menetap di Lolomboli Moro'o. Para misionaris ini tidak ditentang rakyat dan malah sebaliknya akrab dengan rakyat. Para misionaris lebih menonjolkan pelayanan kasihdan melakukan pengobatan secara gratis. Peranan para misionaris dalam mendorong terciptanya situasi keakraban tersebut mendapat dukungan dari pemerintah kolonial Belanda dengan menyediakan berbagai fasilitas termasuk penyediaan obat-obatan. Demikian pula dengan

datang ke Gunung Sitoli yaitu untuk membunuh pimpinan pemerintah Belanda yang ada di Gunung Sitoli dengan cara apapun juga. Ama Leo Zebua sedikit kaget mendengar maksud dari Balugu Tuha Lalai, kemudian menyarankan kepada Balugu Tuha Lalai untuk tidak berbuat demikian karena bila dilakukan tanpa persiapan yang matang merupakan pengorbanan yang sia-sia. Penjelasan dari Ama Leo Zebua dapat dipahami dan diterima oleh Balugu Tuha Lalai. Mulai saat itu juga ia didekati oleh seorang misionaris dan akhirnya menerima dan memeluk agama Kristen (Tim Penyusun, 1989: 82-83).

Pada tanggal 14 Juli 1910 pasukan Belanda dengan dukungan persenjataan dan logistik yang cukup, bergerak dari Gunung Sitoli menuju Moro'o. Ketika mendekati desa Hiligoe sebagai desa pertama yang dilewati dari arah Gunung Sitoli dalam wilayah Ori Moro'o, mereka melangkah maju secara sistem komando dengan maksud untuk menghindarkan sampai sistem terpancang dengan senjata tradisional pejuang yang pernah dialami di Nias Selatan. Pasukan Belanda melakukan pemeriksaan dari rumah kerumah dan yang mereka jumpai hanya anak-anak dan wanita karena semua laki-laki telah masuk hutan untuk bergerilya. Pasukan Belanda meneruskan operasinya dari kampung ke kampung yaitu ke Lolozasai, Iraonogambo dan Sisobahili, dan mereka menemui keadaan penduduk yang kosong sama seperti di Hiligoe (Tim Penyusun, 1989: 73).

Tentara Belanda tidak sabar lagi menghadapi perang gerilya dan mencari stasat agar para pejuang menyerah. Stasat yang mereka lakukan yaitu dengan cara menyiksa wanita dan anak-anak, merampok bahan makanan dan ternak, serta membakar rumah penduduk. Mendengar istri dan anak-anak disiksa disamping perbekalan sudah tidak ada maka para pejuang yang bergerilya di hutan bermusyawarah dan sepakat mau berdamai dengan pihak

Memperkuat Komitmen Kemandesiasaan di Era G. 4.0

pengangkatan *tuhenori*, banyak memanfaatkan peranan para misionaris. Misalnya peranan pendeta Sporket yang berhasil membujuk Tetaru Gulo di Lolomboli untuk diangkat menjadi *Tuhenori Moro'o*. Kemurahan hati Belanda untuk menunjuk seseorang menjadi *tuhenori* bukan tanpa pamrih. Setidak-tidaknya diharapkan orang yang ditunjuk atas keinginannya dapat mendukung berbagai kebijaksanaan Belanda yang akan diterapkan pada rakyat (Tim Penyusun, 1989: 65).

Pemerintah kolonial Belanda di Pulau Nias pada masa *Assisten Resident Van Vuuren* (1908-1913) yang berkedudukan di Gunung Sitoli, mengeluarkan peraturan bahwa setiap penduduk diwajibkan memiliki Surat Pas (*Pas*), membayar *blasing* (pajak) dan wajib kerja rodi. Van Vuuren menjadi *Assisten Resident* pertama di Nias. (P. Johannes. M. Hammerle, 2017: 60).

Pada Tahun 1909 rakyat Nias di Ori Lahomi mengadakan musyawarah dibawah pimpinan Balugu Tuha Lalai, dengan tujuan untuk menentang segala kebijaksanaan dari pemerintah kolonial Belanda maupun para misionaris, sebab Ori Lahomi menyadari bahwa kedatangan pemerintah kolonial Belanda, tujuannya adalah untuk merobohkan ketentuan-ketentuan adat yang telah ditetapkan para pimpinan adat sejak dari nenek moyang rakyat Nias. Balugu Tuha Lalai adalah seorang yang memiliki keahlian dalam ilmu bela diri. Oleh karena keahliannya, dia menjadi terkenal dan disegani diseluruh Ori Lahomi (Tim Penyusun, 1989: 79).

Balugu Tuha Lalai menjadi buronan pemerintah Belanda karena sulit ditangkap berkat ilmu bela diri yang dimilikinya. Tempat persembunyian Balugu Tuha Lalai sekaligus sebagai tempat tinggal, yaitu di atas sebuah bukit kecil. Selama menjadi buronan, Balugu Tuha Lalai pergi ke Gunung Sitoli dan bertemu dengan Ama Leo Zebua seorang pegawai pemerintah Belanda. Kepada Ama Leo Zebua, ia mengutarakan maksudnya

Memperkuat Komitmen Keindonesiaan di Era G. 4.0

Belanda.Misi perdamaian dipercayakan kepada Idano Gulo atau Ama Mbohoh gelar Balugu Sesolo.Langkah pertama yang ditempuh yaitu mendekati pendeta Lagemen di Lolomoyo atau sekarang disebut Simae'asi.Pendeta Lageman bersedia membantu misi perdamaian ini asalkan semua penduduk Moro'o menerima dan memeluk Agama Kristen.Usul pendeta Lagemen diterima oleh para pejuang(Tim Penyusun, 1989: 75).

E.Kesimpulan

Pulau Nias yang terletak di pantai barat Sumatera mempunyai peranan yang penting dalam pemerintahan Belanda baik dalam bidang politik, ekonomi, agama.Oleh karena itu Pulau Nias tetap menjadi bagian dari daerah jajahan Belanda.Untuk itulah Belanda menjadi Nias bagian dari Residensi Tapanuli.Selanjutnya di Pulau Nias Pemerintah Kolonial Belanda membagi Nias menjadi beberapa distrik. Bahkan untuk mengintensifkan penjahannya di Nias maka tahun 1857 Bahasa Belanda menjadi bahasa pengantar dalam pendidikan di Nias, meskipun nanti tahun 1858 bahasa pengantarnya diganti dengan bahasa Melayu.

Sama seperti di tempat lain di Hindia Belanda maka di Pulau Nias juga terjadi perlawanan rakyat terhadap pemerintah kolonial Belanda, baik di Nias Selatan, Tengah maupun Barat. Perjuangan rakyat Nias banyak terjadi di Nias Selatan, mengingat Nias Selatan wilayahnya di pedalaman dan berbukit-bukit.Disamping itu penduduk Nias Selatan lebih cerdas dan memiliki jiwa patriotisme.Penduduk Nias Selatan menentang penjajah Belanda sampai titik darah penghabisan.Dacrah yang menentang habis-habisan melawan penjajah Belanda adalah desa Orahili.Perjuangan rakyat Nias Barat lebih dikaitkan dengan penyebaran agama Kristen.

DAFTAR PUSTAKA

Alain Viaro, *Nias Archives on Bibliography*, Geneva, 2015.
 Anadona, "Dari Tradisional Ke Kolonial: Sistem Pemerintahan di Pulau Nias Hingga Abad ke-19" dalam Khairil Anwar (Editor), *Prosiding Forum Ilmiah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas, Seminar Internasional Budaya Membentuk Jati Diri dan Karakter Bangsa* (Padang: Fakultas Ilmu Budaya), tt.
 Andrew Beatty, *Society and Exchange in Nias*, Oxford: Clarendon Press, 1992.
 ANRI, SWk. 151.1, Memorie van Overgave J. Van Swieten.
 E.B. Kielstra, *Beschrijving van den Atjeh-Oorlog met Gebruimeker der Officieele Bronnen*, Jilid 1, ('s-Gravenhage: de Gebroeders van Deef: 1883).
 E.S. de Klerck, *De Atjeh-Oorlog*. Deel I, 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1912.
 Fangehao Matias Zebua, *Nidunö-Dunö Somasido Urongo*.
 Gunungsitoli: Yayasan Pusaka Nias, 2015.
 Gusti Asnan. *Pemerintahan Sumatera Barat Dari VOC Hingga Reformasi*.Yogyakarta: Citra Pustaka, 2006.
 Kees Groeneboer, *Jalan ke Barat: Bahasa Belanda di Hindia Belanda 1600-1950*, Jakarta: Erasmus Taalcentrum, 1995.
 Kees Groeboer. "Politik Bahasa pada Masa Hindia Belanda" *Wacana*, Vol. 1, No. 1, 1999.
 Ketut Wiradnyana. *Legitimasi Kekuasaan Pada Budaya Nias*. Jakarta: Koenijoroningrat *Manusia dan Kebudayaan Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 1982.